

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2018



<https://pesawarankab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESAWARAN**



bps.sawitkab.bps.go.id

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2018



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN PESAWARAN 2018

ISBN : 978-602-632-956-1

Nomor Publikasi : 18090.1816

Katalog BPS : 7102025.1809

Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : x + 61 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Gambar Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Dicetak Oleh :

CV. Jaya Wijaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pesawaran 2018 dapat diterbitkan. Publikasi ini menyajikan analisis Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pesawaran tahun 2018 yang merupakan salah satu komponen utama penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 bagi Kabupaten Pesawaran. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran.

Kepada semua pihak diucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga publikasi ini dapat diselesaikan. Tak lupa kepada seluruh pembaca diharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan publikasi selanjutnya.

Gedong Tataan, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pesawaran



WINTARTI DYAH INDRIANI, S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
II. KONSEP DAN DEFINISI	5
2.1. Dana Alokasi Umum	5
2.2. Indeks Kemahalan Konstruksi	9
III. METODOLOGI.....	13
3.1. Ruang Lingkup	13
3.2. Metode Pendekatan Harga	13
3.3. Paket Komoditas	14
3.4. Pemilihan Kualitas	17
3.5. Pemilihan Responden.....	17
3.6. Alokasi Sampel	18
3.7. Kegiatan Pengumpulan Data	19
3.8. Penghitungan Diagram Timbang IKK	19
3.9. Metode Penghitungan IKK	26
IV. HASIL ANALISIS	29
4.1. Gambaran Umum	29
4.2. Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Pesawaran 2018.....	30

4.3. Perbandingan IKK Kabupaten Pesawaran dengan IKK Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018	31
4.4. Sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesawaran 2019.....	35
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	43

<https://pesawarankab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
3.1 Paket Komoditas IKK 2018	16
4.2 Data Dasar Penghitungan DAU Kabupaten Pesawaran 2019	36

<https://pesawarankab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

GAMBAR	HALAMAN
4.1. IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018	32
4.2. Peta IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018.....	34

<https://pesawarankab.bps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah pusat memerlukan kontrol yang kuat guna pengawasan ekonomi daerah dalam menjaga stabilitas nasional.

Pemerintah daerah memerlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Aturan mengenai pengelolaan keuangan secara desentralisasi tersebut telah ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 menggantikan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah, sekaligus

memeratakan kemampuan antardaerah (*equilization grant*), pemerintah pusat mentransfer dana ke pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Pagu DAU tersebut minimal sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto. Dana Alokasi Umum ini bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, salah satu komponen utama yang digunakan dalam penghitungan DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) dan Alokasi Dasar (AD). Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Salah satu variabel penyusun kebutuhan fiskal adalah IKK, sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan sumber pendanaan daerah, dan alokasi dasar berupa jumlah gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) daerah.

Data yang digunakan untuk menghitung IKK adalah data harga konstruksi, seperti harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi dan harga upah jasa konstruksi. Data tersebut diperoleh dari seluruh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Indonesia dengan melakukan survei serentak harga bahan bangunan/konstruksi paket komoditas yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI).

IKK pertama kali dihitung BPS pada tahun 2003 atas permintaan Departemen Keuangan untuk keperluan penghitungan DAU 2004 dan dilanjutkan hingga sekarang. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

1.2. Tujuan

Tujuan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2018 adalah untuk menyediakan data dasar dalam menyusun kebijakan dana perimbangan, yakni digunakan sebagai salah satu komponen utama kebutuhan fiskal dalam penghitungan DAU untuk pengalokasian 2019. Adapun tujuan diterbitkannya publikasi ini, yaitu:

- a. Meningkatkan wawasan mengenai konsep pembangunan dengan kebijakan Otonomi Daerah.
- b. Meningkatkan wawasan tentang konsep dan kegunaan IKK dalam perumusan DAU.

2.1. Dana Alokasi Umum

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, pembiayaan tersebut diperoleh dari tiga sumber, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), berupa: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-lain pendapatan, seperti: hibah dan pendapatan dana darurat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Hal ini bertujuan untuk membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU diharapkan dapat menjembatani, tidak hanya kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal gap*), tetapi juga sebagai alat pemerataan kemampuan fiskal antardaerah (*horizontal fiscal equalization*).

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Indeks kemahalan konstruksi menjadi komponen penting dalam perumusan DAU disamping jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, luas wilayah, dan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Formula DAU:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Penggunaan variabel dalam formula DAU adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi Dasar (AD), dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah.
- b. Celah Fiskal (CF) adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Rumus Celah Fiskal:

$$\text{CF} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

- Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Needs*) merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel:
- (i) Jumlah Penduduk (JP), mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah.
 - (ii) Luas Wilayah (LW), mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah.
 - (iii) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah.
 - (iv) PDRB per kapita, mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk.
 - (v) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Rumus Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Needs*):

$$\mathbf{KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB)}$$

Keterangan:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
- IPDRB = Indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita
- α_i = Bobot Indeks

TBR digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur kebutuhan fiskal daerah. Adapun bobot α_i ditentukan dengan pertimbangan pembobotan secara proporsional untuk mencapai tingkat pemerataan fiskal antar daerah, dengan menggunakan indikator *coeficient of Variation* dan *Index williamson*.

- Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*), terdiri dari:
- (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - (ii) Dana Bagi Hasil (DBH)

Rumus Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*):

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Penerimaan Sumber Daya Alam

Selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah akan digunakan sebagai bobot daerah dalam memproporsikan DAU. Secara matematis, hasil rumusan tersebut memungkinkan adanya daerah yang tidak

menerima DAU karena daerah tersebut memiliki selisih sama dengan nol atau negatif. Namun, hal tersebut dapat dihindari dengan memakai faktor penyeimbang yang merupakan alokasi minimal berupa lumpsum dan belanja pegawai. Variabel kebutuhan fiskal suatu daerah hendaknya dapat mengakomodir kebutuhan suatu daerah yang digunakan untuk pembiayaan program-program daerah dan pembangunan fasilitas daerah seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kebutuhan pokok lainnya.

2.2. Indeks Kemahalan Konstruksi

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlah bahan bangunan dan jasa yang menjadi paket komoditas.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yaitu angka yang menunjukkan perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) secara umum dari suatu daerah terhadap daerah lainnya. Kota Semarang dijadikan kota acuan dalam penghitungan IKK tahun 2018. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional, dan mempertimbangkan kelengkapan sumber data. IKK Kabupaten Pesawaran tahun 2018 merupakan indeks harga yang

menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Pesawaran dibandingkan dengan Kota Semarang (kota acuan).

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk daerah/wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Penghitungan IKK memerlukan struktur harga yang sama seperti kualitas dan satuan jenis harga. Selain itu, harga tersebut juga harus *comparable* dan *representative*. Secara jelas, variabel yang dibutuhkan dalam penghitungan IKK, yaitu antara lain:

1. Penimbang komoditas yang diperoleh dari *Bill of Quantity* (BoQ) masing-masing kabupaten/kota
2. Diagram timbang umum dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)
3. Data harga, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi.

3.1. Ruang Lingkup

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pesawaran tahun 2018 adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Pesawaran dibandingkan dengan Kota Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penghitungan IKK berasal dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan dan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran.

3.2. Metode Pendekatan Harga

Ada dua metode penghitungan untuk membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, yaitu pendekatan harga input dan pendekatan harga output. Pendekatan harga input dilakukan dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini yakni kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Adapun pendekatan output yaitu dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Kelemahan pada harga output adalah di dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang

bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak *representative* digunakan untuk membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatif dari metode harga input dan output adalah dengan mengumpulkan harga konstruksi yang dapat mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Jika harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan diperoleh harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input, tetapi kurang dari harga output. Hal ini disebabkan *overhead cost* dan upah sudah dimasukkan, tetapi biaya manajemen dan keuntungan kontraktor dikeluarkan. Data tersebut dapat diperoleh dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

Sementara itu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap digunakan sebagai salah satu penimbang IKK. Dengan demikian, setiap tahun, IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

3.3. Paket Komoditas

Paket komoditas adalah sejumlah jenis bahan bangunan/konstruksi yang digunakan di sektor bangunan/konstruksi yang akan diamati harganya. Paket komoditas mencakup barang-barang natural/ penggalian, barang-

barang hasil industri, sewa alat berat dan jasa. Ada tiga asas pemilihan paket komoditas IKK, yaitu:

- a. *Comparability* (keterbandingan)
- b. *Representativeness* (mewakili)
- c. *Trade off comparability vs representativeness*.

Adapun tahapan pemilihan paket komoditas IKK adalah sebagai berikut:

- (i) Memilih barang dan jasa yang nilainya dominan dan digunakan pada sektor konstruksi dengan koreksi *proxy* kesulitan geografis.
- (ii) Kualitas barang ditentukan berdasarkan data harga yang dominan yang masuk dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi setiap tahunnya.
- (iii) Jika terdapat kesamaan dominasi kualitas barang maka dilihat koefisien variasi masing-masing kualitas barang tersebut.
- (iv) Semakin kecil koefisien variasi kualitas barang, semakin kecil perbedaan harganya (homogen).

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK sebanyak 58 komoditas. Dari ke-58 komoditas tersebut dilakukan pendataan terhadap tiga responden yang berbeda di setiap komoditasnya sehingga akan dihasilkan data penyeimbang yang lebih baik dan akurat. Komoditas yang didata antara lain:

Tabel 3.1 Paket Komoditas IKK

Komoditas	
• Tanah Urug	• Gypsum
• Pasir	• Kabel
• Batu pondasi	• Bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II
• Batu bata	
• Batako	• Mesin Pompa Air
• Batu split	• Rangka Atap Baja
• Seng Gelombang	• Alumunium
• Paku	• Tangki Air Fiber
• Semen Portland	• Lampu
• Besi Beton (full)	• MCB (SPLN 108-1993)
• Bak Mandi Fiber	• Excavator PC-200
• Kloset	• Buldozer D-65
• Seng Plat	• Loader
• Pipa PVC	• Tandem/Vibrating Roller
• Kayu Balok	• Dump Truck
• Kayu Papan	• Motor Grader
• Kayu lapis /Triplek	• Asphalt Finisher
• Cat Emulsi	• Generator Set
• Cat Minyak	• Upah Kepala Tukang
• Tegel / Keramik	• Upah Tukang Batu
• Genteng / Atap	• Upah Tukang Kayu
• Kaca	• Upah Instalatir Listrik
• Aspal	• Upah Pembantu Tukang

3.4. Pemilihan Kualitas

Kualitas barang atau bahan bangunan/konstruksi yang digunakan untuk menghitung IKK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kualitas terpilih harus kualitas yang tercantum dalam kuesioner Survei Harga Kemahalan Konstruksi yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yaitu kualitas umum yang biasanya ada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- b. Apabila kualitas barang atau bahan bangunan/konstruksi tidak tersedia maka dipilih kualitas yang paling dominan di kabupaten/kota bersangkutan dengan satuan standar yang telah ditentukan dalam kuesioner Survei Harga Kemahalan Konstruksi.

3.5. Pemilihan Responden

Responden yang terpilih sebagai sampel dalam Survei Harga Kemahalan Konstruksi antara lain: pedagang besar/distributor, rekanan, kontraktor, asosiasi, atau instansi pemerintah yang terkait dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan daerah. Responden tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu :

- a. Kategori pedagang besar/distributor, yaitu para penjual/pedagang bahan/konstruksi yang memiliki bahan bangunan yang relatif banyak dan menjualnya dalam jumlah besar (partai besar/grosir), seperti distributor berbagai bahan bangunan, distributor cat, distributor semen dan lain-lain.

- b. Kategori Kontraktor, yaitu para pemakai bahan bangunan/konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang digunakan dalam kegiatan konstruksi di daerah seperti perusahaan kontraktor, baik swasta maupun BUMD.
- c. Kategori lainnya, yaitu para pengguna bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan di daerah seperti rekanan, perusahaan BUMN (misal: PT PLN) dan Instansi pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum) yang melaksanakan proyek-proyek pembangunan di daerah.

Pemilihan responden sebagai sampel dilakukan secara purposif dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Memilih pedagang besar/distributor yang menjual berbagai jenis bahan bangunan/konstruksi yang variatif dan dalam jumlah besar serta dapat menjadi barometer perubahan harga setempat.
- b) Apabila pedagang besar/distributor tidak dijumpai di lapangan, maka dipilih responden dengan kategori kontraktor atau kategori lainnya, yaitu responden yang menggunakan bahan bangunan/konstruksi dalam jumlah besar dan variatif, menyediakan dan menggunakan jasa konstruksi dalam kegiatan konstruksinya.

3.6. Alokasi Sampel

Alokasi sampel yang digunakan untuk Survei Harga Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Pesawaran adalah 14 responden. Setiap jenis

komoditas diwakili oleh tiga responden, baik sebagai pedagang besar/distributor, kontraktor, maupun pengguna bahan bangunan. Namun, ada beberapa komoditas yang tidak dapat diwakili oleh tiga responden karena ketersediaan komoditas tersebut.

3.7. Kegiatan Pengumpulan Data

Pengumpulan data Survei Harga Kemahalan Konstruksi Tahun 2018 dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pencacahan survei IKK tersebut menggunakan kuesioner VIKK. IKK Kabupaten Pesawaran tahun 2018 menggunakan data harga komoditas konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam empat periode pencacahan yaitu periode akhir Juli 2017, periode akhir Oktober 2017, periode Januari 2018, dan periode akhir April 2018. Sama halnya dengan IKK tahun 2017, IKK tahun 2018 menggunakan empat periode pencacahan karena dapat mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

3.8. Penghitungan Diagram Timbang IKK

Basket of Construction Components (BOCC) Approach

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC), digunakan dalam *International Comparison Programs* (ICP) tahun 2005. Metode tersebut

didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi merupakan output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan merupakan elemen kunci dalam proses pendekatan tersebut. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC yaitu memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BoQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga dua jenis komponen, yaitu komponen gabungan dan input dasar. Untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Kemudian, sistem-sistem tersebut dikelompokkan ke dalam *basic heading*. *Basic heading* merupakan pengklasifikasian sektor konstruksi ke dalam 3 kategori, yaitu:

1. Gedung dan Bangunan, yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang IKK yaitu:
 - a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.

- b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang yaitu:
 - a. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian, antara lain:
 - Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan *drainase* irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
 - b. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - Bangunan jalan, jembatan, dan landasan pesawat terbang, pagar/tembok, *drainase* jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - Bangunan jalan dan jembatan kereta.
 - Bangunan dermaga, meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.
 - c. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
 - Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tenaga tinggi.

- Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - Konstruksi sentral komunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/ stasiun satelit.
 - Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah serta saluran *drainase* pada gedung.
 - Instalasi listrik, meliputi: pemasangan jaringan listrik tegangan lemah, dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 - Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
 - Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
 - Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
3. Bangunan Lainnya, yang tercakup dalam klasifikasi ini yaitu: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka

baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Sistem Konstruksi

Menurut konsep pendekatan BOCC, sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan yang diklasifikasikan kembali ke dalam kumpulan komponen yang bertujuan untuk mendukung bangunan seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan lainnya.

Komponen Konstruksi

Komponen merupakan kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasi secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen yaitu beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolam, dan lainnya. Secara umum, sebuah komponen terdiri dari beberapa material, tenaga kerja, dan peralatan.

Dalam penghitungan diagram timbang IKK, komponen-komponen yang digunakan berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan,

jembatan, dan pelabuhan, bangunan umum untuk jaringan air, listrik, dan komunikasi), serta bangunan 3 (bangunan lainnya).

Biaya tiap komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut.

Sistem penimbang yang digunakan dalam pendekatan BOCC ada tiga, yaitu:

1. W1 merupakan penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

Diagram Timbang IKK

Sejak tahun 2003 IKK sudah dihitung. Untuk menghitung IKK, penimbang yang digunakan adalah BoQ tahun 2003. Pesatnya industri bahan bangunan dan perkembangan teknik sipil yang sangat cepat mengakibatkan material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi pun banyak yang berubah atau muncul model baru, seperti atap baja ringan, batako ringan, kusen aluminium, dsb. Begitu juga Peraturan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi kegiatan konstruksi telah banyak berubah. Hal-hal tersebut menyebabkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, penghitungan IKK tahun 2018 sudah menggunakan BoQ realisasi perkembangan suatu konstruksi selama tahun 2017 di Kabupaten/Kota.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan Kabupaten/Kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
- b. Melakukan pengkodean system pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.
- c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ. Setiap uraian pekerjaan

BoQ terdapat beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan.

2. Menghitung *share* nilai untuk masing-masing tahapan penimbang (W1, W2, dan W3) setiap Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Jika tidak ada pembangunan selama tahun 2017, maka bisa digantikan dengan BoQ dari pembangunan pada tahun 2016. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing Kabupaten/Kota agar setiap Kabupaten/Kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

3.9. Metode Penghitungan IKK

Misalkan P_{kn} adalah harga komponen konstruksi n di kabupaten k ($k=1,2,\dots,K$; $n=1,2,\dots,N$), maka model statistik metode *Country Product Dummy* (CPD) dapat ditulis sebagai berikut.

$$p_{kn} = a_k b_n u_{kn}$$

dengan $k=1,2,\dots,K$; $n=1,2,\dots,N$

a_k dan b_n merupakan parameter yang akan diestimasi dari data harga, sedangkan u_n merupakan random variabel yang berdistribusi identik dan independen (IID). Dengan demikian, random variabel diasumsikan berdistribusi lognormal atau dengan kata lain $\log p_{kn}$ berdistribusi normal dengan *mean* 0 dan *varians* σ^2 , dalam bentuk logaritma model di atas yang dilinierkan.

$$\begin{aligned} \ln p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\ &= \alpha_k + \gamma_n + v_{kn} \end{aligned}$$

Parameter a_k diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Jika a_k dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap kabupaten yang dijadikan referensi/acuan, misal Kabupaten X, maka a_k adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), harga di Kabupaten X. Dengan kata lain, harga konstruksi di Kabupaten K 'setinggi' a_k dibanding harga konstruksi di Kabupaten X. Oleh sebab itu IKK di Kabupaten K dinyatakan sebagai

$$IKK_k = \exp(\alpha_k)$$

Agar interpretasi menjadi lebih mudah, maka persamaan tersebut dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.

4.1. Gambaran Umum

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan kebijakan otonomi daerah tahun 2001 guna melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial. Dengan adanya landasan hukum mengenai otonomi daerah, masyarakat Kabupaten Lampung Selatan di belahan barat berupaya untuk membentuk Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung tanggal 10 Agustus 2007.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dituntut agar dapat menyajikan indikator-indikator pembangunan daerahnya. Salah satu indikator tersebut adalah IKK Kabupaten/Kota yang menggambarkan perkembangan harga bahan bangunan secara rata-rata pada periode tertentu terhadap tahun dasar di suatu kabupaten/kota. Pembentukan IKK Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat mencerminkan tingkat kesulitan geografis wilayah sehingga alokasi DAU yang dilakukan pemerintah pusat dapat sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Pesawaran.

IKK kabupaten/kota 2018 dihitung serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK disajikan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang

kemudian dikalikan dengan suatu bilangan/inflator. Sejak tahun 2010, IKK rata-rata tidak berdasarkan rata-rata nasional tetapi berdasarkan IKK kota acuan. Angka IKK yang dihasilkan oleh sebuah kabupaten/kota dibandingkan dengan “kota dasar”. Pemilihan kota acuan sebagai rata-rata IKK karena kabupaten/kota tersebut memiliki nilai IKK mendekati 100.

Indeks Kemahalan Konstruksi menggunakan indeks spasial yang berarti bahwa fungsi indeks digunakan untuk membandingkan antar daerah pada waktu yang bersamaan. Angka IKK tahun sekarang tidak bisa dibandingkan (naik/turun) dengan angka IKK tahun lalu karena setiap tahun, IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

4.2. Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Pesawaran 2018

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pesawaran tahun 2018 adalah sebesar 83,22. Angka tersebut menggambarkan bahwa tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Pesawaran lebih rendah dibandingkan dengan Kota Semarang sebagai kota acuan. Angka IKK tidak dapat diterjemahkan jika tidak ada IKK kabupaten/kota lainnya sebagai perbandingan.

IKK Kabupaten Pesawaran pada tahun 2017 adalah sebesar 87,54. Turunnya angka IKK tidak menunjukkan bahwa harga bahan bangunan atau nilai bangunan di Kabupaten Pesawaran juga ikut turun. Angka IKK tidak dapat diperbandingkan antar tahun karena setiap tahun, IKK suatu

kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota, berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota. Oleh sebab itu, kenaikan atau penurunan angka IKK suatu kabupaten/kota mempengaruhi kenaikan atau penurunan angka IKK kabupaten/kota lainnya.

Secara provinsi, IKK Provinsi Lampung tahun 2018 juga menunjukkan angka di bawah 100, yakni 89,31. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kemahalan konstruksi di Provinsi Lampung lebih rendah dibandingkan dengan daerah acuan yaitu Provinsi Jawa Tengah.

4.3. Perbandingan IKK Kabupaten Pesawaran dengan IKK Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018

Dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, IKK Kabupaten Pesawaran menduduki peringkat ke-14, lebih tinggi dengan peringkat IKK pada tahun 2017 yang menduduki peringkat ke-8 se-Lampung. IKK Kabupaten Pesawaran tahun 2018 sebesar 83,22. Sedangkan IKK Provinsi Lampung pada tahun 2018 sebesar 89,31. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Pesawaran lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kemahalan konstruksi di Provinsi Lampung. Biaya pembangunan di Kabupaten Pesawaran lebih murah 7,32 persen dibandingkan dengan rata-rata biaya pembangunan di Provinsi Lampung.

Kabupaten/kota yang memiliki angka IKK tertinggi adalah Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai IKK 100,68. Adapun Kabupaten Lampung Timur adalah pemegang IKK terendah, yaitu sebesar 78,90.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Pesawaran lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Tulang Bawang, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Timur. Biaya pembangunan di Kabupaten Pesawaran lebih murah 20,98 persen dibandingkan dengan biaya pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, namun lebih mahal 5,48 persen dibandingkan dengan biaya pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Gambar 4.1 IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018

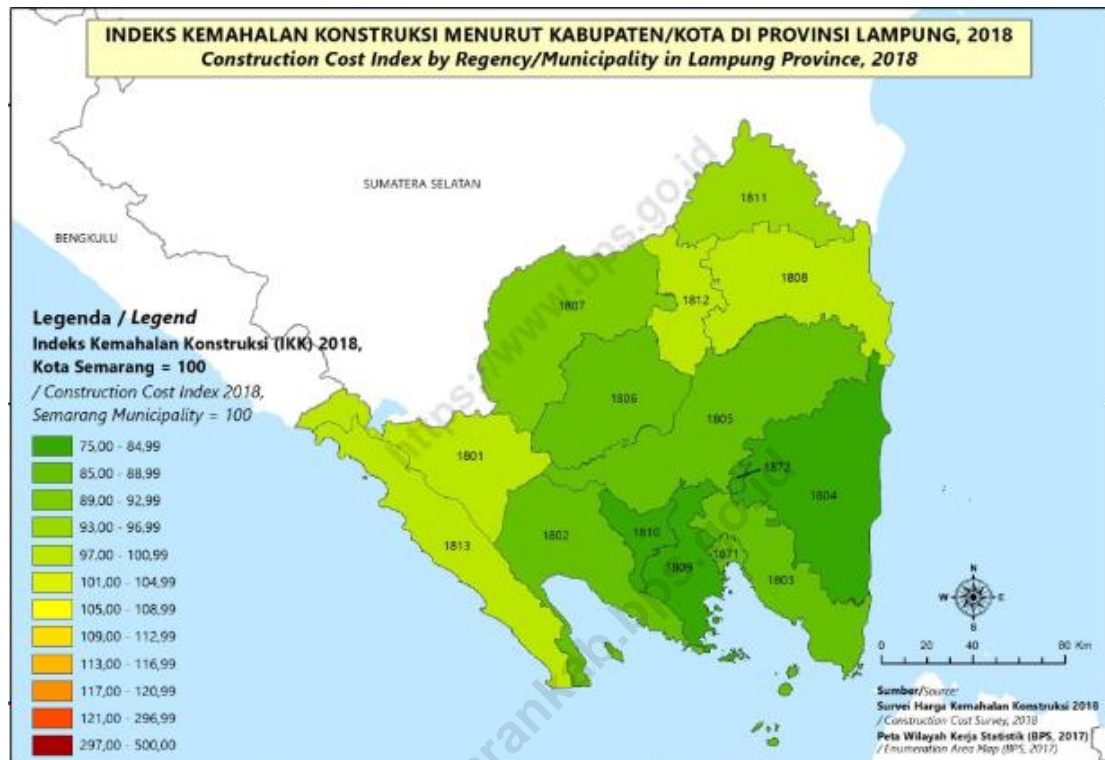


Kota Metro merupakan Kabupaten yang angka IKK pada tahun 2018 hampir sama dengan Kabupaten Pesawaran, yakni 83,53. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kemahalan di Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro hampir sama di tahun 2018.

Jika dibandingkan dengan wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Pesawaran, yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, dan Pringsewu, biaya pembangunan di Kabupaten Pesawaran adalah biaya pembangunan yang paling murah. Angka IKK Kabupaten Tanggamus, Lampung selatan dan Kabupaten Pringsewu masing-masing sebesar 88,70, 85,75 dan 84,28. Artinya, biaya pembangunan di Kabupaten Pesawaran lebih murah sebesar 6,58 persen dibandingkan Kabupaten Tanggamus, lebih murah 3,04 persen dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan 1,27 persen lebih murah dibandingkan dengan Kabupaten Pringsewu.

Pada umumnya, IKK menggambarkan rata-rata harga paket komoditas yang terdiri dari bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat, serta jasa konstruksi di suatu daerah. Harga bahan bangunan dan sewa alat berat di Kabupaten Pesawaran relatif lebih mahal dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Timur. Namun relative lebih murah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Gambar 4.2 Peta IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018



Salah satu hal yang mempengaruhi nilai IKK Kabupaten Pesawaran adalah karena letak geografis Kabupaten Pesawaran yang cukup strategis. Sebagaimana fungsi IKK yang digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, dapat dinyatakan bahwa letak geografis Kabupaten Pesawaran relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Dengan demikian, tingkat harga bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Pesawaran relatif murah diantara Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Selain harga paket komoditas, besar kecilnya angka IKK juga bergantung dari bobot komoditas dan realisasi APBD Kabupaten Pesawaran.

4.4. Sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesawaran 2019

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Alokasi DAU bagi tiap daerah sangat penting. Hal ini disebabkan DAU merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap daerah. Dengan demikian, alokasi DAU diharapkan dapat proporsional sesuai dengan potensi dan kebutuhan belanja daerah, agar pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ada lima faktor yang mempengaruhi penentuan DAU, yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), luas wilayah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi IKK suatu daerah maka akan semakin tinggi DAU daerah tersebut. Begitupun dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, semakin tinggi kepadatan penduduk dan kondisi geografis yang semakin sulit maka akan semakin tinggi DAU yang harus disediakan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, jika IPM semakin tinggi dan PDRB per kapita semakin besar, sehingga masyarakat semakin sejahtera atau makmur, maka DAU untuk daerah tersebut akan semakin rendah.

Tabel 4.2 Data Dasar Penghitungan DAU Kabupaten Pesawaran 2019

Variabel DAU	Data Dasar DAU
(1)	(2)
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2018	83,22
Jumlah Penduduk Tahun 2018 (Jiwa)	440.192
Luas wilayah (Km ²)	1.173,77
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017	64,43
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Tahun 2017 (Juta Rupiah)	31.801

Sumber Data: BPS Kabupaten Pesawaran

IKK merupakan suatu ukuran yang menggambarkan ketersediaan infrastruktur di suatu daerah. Semakin tinggi nilai IKK mengindikasikan bahwa kondisi infrastruktur daerah tersebut semakin buruk. Hal ini dapat menyebabkan harga tanah dan bangunan akan semakin rendah.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pesawaran tahun 2018 merupakan salah satu dasar penghitungan DAU Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2019. IKK Kabupaten Pesawaran pada tahun 2018 sebesar 83,22. Angka IKK ini harus dibandingkan dengan IKK Kabupaten/Kota lain agar dapat diinterpretasikan karena IKK merupakan indeks spasial.

Berdasarkan Tabel 4.2, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2018 adalah 440.192 jiwa. Jumlah penduduk tersebut meningkat 1,00 persen dibandingkan tahun 2017. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pelayanan yang harus diselenggarakan.

Pelayanan tersebut meliputi beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya.

Adapun luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 Km². Untuk mengakomodasi masuknya wilayah perairan sebagai luas wilayah dalam penghitungan DAU, Bakorsurtanal telah melakukan penghitungan batas terjauh wilayah perairan dari garis pantai, 4 mil dari garis pantai untuk kabupaten/kota dan 12 mil dari garis pantai untuk provinsi.

Daerah yang penduduknya tidak padat, tetapi cakupan wilayahnya luas membutuhkan pembiayaan yang besar. Namun, di sisi lain, luas wilayah juga bisa berpotensi besar dalam sisi penerimaan, seperti hutan, perkebunan, dan pertanian. Salah satu fungsi IKK adalah sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis. Tingginya IKK mengindikasikan bahwa daerah tersebut semakin sulit kondisi geografisnya sehingga tingkat harga di daerah tersebut semakin mahal.

IPM merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah serta peranan birokrasi dalam pencapaian menuju hidup yang layak. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten Pesawaran tahun 2017 adalah sebesar 64,43 dan termasuk kategori sedang. IPM Kabupaten Pesawaran menduduki peringkat ke-13 (2 terbawah) se-Provinsi Lampung. Namun, tingkat kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Pesawaran tergolong cepat dengan angka pertumbuhan 1,51 persen.

Kabupaten Pesawaran memiliki nilai IPM yang lebih rendah dari pada angka IKK. Meskipun angka IPM dan IKK tidak dapat diperbandingkan, kategori IPM yang tergolong rendah (buruk) dan kategori IKK yang termasuk rendah (baik) dapat mengindikasikan bahwa ada ketimpangan kesempatan yang dimiliki manusia untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya. Hak tersebut antara lain untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Pesawaran belum merata dan belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan dari meningkatnya tingkat pendapatan per kapita dalam suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Pesawaran tahun 2017 sebesar 31.801 juta rupiah, meningkat sebesar 6,62 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam rangka meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakatnya.

Semakin tinggi PDRB per kapita dan semakin rendah IKK suatu daerah maka akan mengurangi alokasi DAU dari pemerintah pusat ke daerah. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa pembangunan ekonomi sudah cukup baik dan kondisi geografis di daerah tersebut relatif terjangkau.

Namun, perlu diingat bahwa meningkatnya atau semakin besar PDRB per kapita suatu wilayah belum tentu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bisa saja hanya golongan tertentu yang menikmatinya. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan pendapatan ekonomi yang cukup besar.

<https://pesawarankab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2017. Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2017.

_____.2018. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran. 2017. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pesawaran 2017.

_____. 2018. Kabupaten Pesawaran dalam Angka 2018.

_____. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.

www.bps.go.id.

LAMPIRAN

<https://pesawarankab.bps.go.id>



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI
SEWA ALAT BERAT DAN UPAH JASA KONSTRUKSI
DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK
PERIODE : OKTOBER 2018**

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan *item* yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
2. Responden adalah **pedagang grosir/distributor** yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
3. Responden harus berada di **ibukota** kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari **kualitas yang setara**.
5. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode **harus sama**. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang **setara**.
6. Isian kuesioner dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri dari BPS RI. Hasil entri dikirim ke shpb@bps.go.id dengan cc ke BPS Provinsi masing-masing.
7. Dilarang mengubah format *file* program data entri yang dikirim oleh SHPB.
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa, disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT	
1. Provinsi	<input type="text"/>
2. Kabupaten / Kota	<input type="text"/>

BLOK II : KETERANGAN PENCACAH DAN PENGAWAS			
1. Nama Pencacah	<input type="text"/>	6. Nama Pengawas	<input type="text"/>
2. NIP Pencacah	<input type="text"/>	7. NIP Pengawas	<input type="text"/>
3. Tanggal Pencacahan	5. Selesai Dientri Tanggal	8. Tanggal Pengawasan	
4. Tanda Tangan Pencacah	<input type="text"/>	9. Tanda Tangan Pengawas	<input type="text"/>

OKTOBER 2018**BLOK III : DATA HARGA MATERIAL**

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMERK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol, dll)	Ukuran Satuan Setempat				Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (perusahaan/toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MCB (SPLN 108-1993) SCHNEIDER (merlin gerin, broco, dll)	1 Phasa 6 Ampere	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	1 Phasa 10 Ampere	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											

PENJELASAN PENGISIAN BLOK III**TANAH URUG, PASIR, BATU PONDASI, BATU SPLIT**

Satuan standar untuk barang-barang ini adalah m3. Jika harga yang diperoleh sudah dalam m3 maka isi kolom 7,8,9 dengan angka 1 dan isikan harga per m3 pada kolom 12. Jika satuan pencacahan tidak standar (truk,pick up) maka isikan panjang, lebar, dan tinggi bak yang terisi kemudian harga yang dicacah per satuan tsb pada kolom 12.

BATU BATA, BATAKO

Isikan ukuran batu bata/batako per buah yaitu: panjang, lebar, dan tinggi dalam meter kemudian tulis harga batu bata per buah pada kolom 12.

SEMEN PORTLAND, CAT EMULSI

Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Isikan merk pada kolom 5, berat per kemasan di kolom 10, dan harga per kemasan pada kolom 12.

BESI BETON, PIPA PVC

Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Isikan panjang PIPA PVC atau BESI BETON pada kolom 7 kemudian harga per batangnya pada kolom 12.

KAYU BALOK, KAYU PAPAN

Tuliskan jenis kayu pada kolom 5. Satuan standar kayu balok atau kayu papan adalah m3. Jika pencacahan barang tsb sudah dalam satuan m3 maka isikan kolom 7,8,9 dengan angka 1 kemudian isikan harga per m3 pada kolom 12. Jika kayu per lembar maka isikan panjang, lebar, dan tinggi kayu pada kolom 7-9. Isikan harga kayu per lembar pada kolom 12. Jika kayu per ton maka isikan kolom 11 dengan angka konversi dari ton ke m3 (1 ton = ... m3), sedangkan kolom 7-9 dikosongkan. Harga yang dicatat pada kolom 12 adalah harga kayu per ton.

KACA, GYPSUM

Utamakan mencacah merk yang ditentukan.Tuliskan merk pada kolom 5 kemudian isikan panjang dan lebar kaca/gypsum plafon per lembar (dalam meter) pada kolom 7,8. Tuliskan harga kaca/gypsum plafon per lembar pada kolom 12.

KABEL

Cacah harga kabel yang dijual per rol, bukan per meter. Isikan kolom 7 dengan panjang kabel per rol dan harga kabel per rol pada kolom 12.

PENEGASAN PENCACAHAN IKK

1. PENCACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL (PASIR, BATU PONDASI, BATU SPLIT, BATU BATA, BATAKO, KUSEN) DIPERBOLEHKAN DARI PRODUSEN YANG TIDAK BERADA DI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA.

2. PENCACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL TIDAK HARUS *READY STOCK*.

3. PEMILIHAN KUALITAS/SPESIFIKASI BARANG HARUS SAMA SETIAP TRIWULANNYA.

4. UNTUK SEWA ALAT BERAT PADA BLOK 4, DI KOLOM KETERANGAN TULISKAN APAKAH HARGA SEWA MERUPAKAN HASIL KONVERSI ATAU TIDAK.

OKTOBER 2018**BLOK IV. DATA SEWA ALAT BERAT DAN UPAH PEKERJA KONSTRUKSI**

Responden: Jasa Penyewaan Alat Berat (umur alat berat maksimal 8 tahun, tanpa operator dan bahan bakar)

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Excavator PC-200	Kapasitas Bucket 0,8 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)		
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
	Kapasitas Bucket 0,6 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
	Kapasitas Bucket 0,4 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
Buldozer D-65	Universal Blade (U-Blade)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)		
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
	Straight Blade (S-Blade)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
	Bowl Dozer	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
Loader (Wheel atau Track)	Kapasitas Bucket 0,8 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)		
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Loader (Wheel atau Track)	Kapasitas Bucket 0,6 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas Bucket 0,4 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Tandem / Vibrating Roller	8 - 10 ton	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kurang Dari 8 ton	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Dump Truck	Kapasitas 20 ton (Tronton)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas 12 ton (Engkel)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas 8 ton (Colt Diesel)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Motor Grader	≤ 100 HP	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	> 100 HP	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Asphalt Finisher		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Generator Set	60 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	40 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	20 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			

JASA KONSTRUKSI

Upah Kepala Tukang		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Tukang Batu		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Tukang Kayu		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Instalatir Listrik		I	Titik		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Pembantu Tukang		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				

BLOK V : CATATAN

<https://pesawarankab.bps.go.id>

..... Oktober 2018

Mengetahui,
Kepala BPS Kabupaten / Kota

(.....)

NIP.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESAWARAN**
BPS-Statistics of Pesawaran Regency

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kutoarjo, Kec. Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung 35371
Telp (0721)94711; email: bps1809@bps.go.id; web: pesawarankab.bps.go.id